

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Edisi Revisi

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



# KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem akuntabilitas kinerja di lingkungannya. Penyelenggaraan tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.


Rencana strategis (Renstra) sebagai salah satu bagian dokumen perencanaan kinerja perlu dirumuskan secara baik dan benar agar dapat dijadikan acuan bagi unit kerja beserta ekosistem didalamnya selama kurun waktu lima tahun.

Renstra Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dengan dilengkapi indikator, target kinerja arah kebijakan dan strategi yang jelas. Tujuan, sasaran, indikator dan target yang ditetapkan telah selaras dengan rumusan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (program/kegiatan) dan sebagai petunjuk bagi segenap warga BPMP dalam lima tahun ke depan. Semoga Allah S.W.T. memberikan kita kekuatan untuk merealisasikan target kinerja yang ditetapkan sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.



Pangkalpinang, Juli 2022

  
D. Guritno Wahyu Wijanarko, M.E  
NIP 197108191998031003



# Daftar Isi

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
BAB I	Pendahuluan	1
	Kondisi Umum	4
	Potensi dan Permasalahan	21
BAB II	Tujuan dan Sasaran	26
	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	26
	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	27
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	28
	Arah Kebijakan dan Strategi	28
	Kerangka Regulasi	33
	Kerangka Kelembagaan	34
	Reformasi Birokrasi	41
BAB IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	44
	Target Kinerja	44
	Kerangka Pendanaan	45
BAB V	Penutup	47
Lampiran		48
	Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020	49
	Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021	50
	Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2022-2024	51
	Definisi Operasional Indikator Kinerja	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan pendidikan merupakan amanat konstitusi, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Negara, dalam Pembukaan UUD 1945 memberikan janji kepada bangsa ini untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Di dalam pasal 28c UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Konstitusi memberikan landasan yang kuat sebagai dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbudristek telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbudristek kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbudristek akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. **Pertama**, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya.

Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone. **Kedua**, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

**Ketiga**, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar. **Keempat**, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbudristek telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) kebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbudristek, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, Balai pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa

menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Rencana strategis (Renstra) Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan proses dalam menghasilkan output. Rencana Strategis juga memuat visi, misi, tujuan arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan organisasi. Peranan BPMP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang tercantum Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP merupakan Unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas **adalah** melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Selain itu untuk menjalannya tugas yang diembannya BPMP Penyelenggara fungsinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
- b. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
- c. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu Pendidikan

- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu Pendidikan
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dengan perencanaan yang matang, maka BPMP Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu menyusun suatu rencana strategis (Renstra) sebagai panduan untuk menyusun perencanaan ke depan, sesuai dengan kebutuhan Pemangku Kepentingan Pendidikan dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan.

## **A. Kondisi Umum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

### **1. Berdasarkan Raport Mutu**

Kinerja BPMP diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase satuan pendidikan yang telah melakukan penjaminan mutu internal melalui evaluasi diri sekolah (EDS) mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. BPMP Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program EDS di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pada satuan pendidikan. Program EDS dilaksanakan dengan menggunakan beberapa strategi berikut:

1) Pendekatan integrasi proses, artinya EDS *online* berbasis sistem Dapodik, 2) integrasi SDM dengan melibatkan pihak BPMP dan pengawas sebagai fasilitator pendampingan EDS di daerah, 3) pemanfaatan IT melalui instrumen EDS yang mudah digunakan hingga tingkat sekolah, dan 4) instrumen yang digunakan berbasis kuantitatif sehingga mudah dianalisis.

Profil Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

### a. Capaian Standar Nasional Pendidikan SD

Capaian SNP hasil pemetaan mutu pendidikan Jenjang Sekolah Dasar berdasar Rapor PMP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

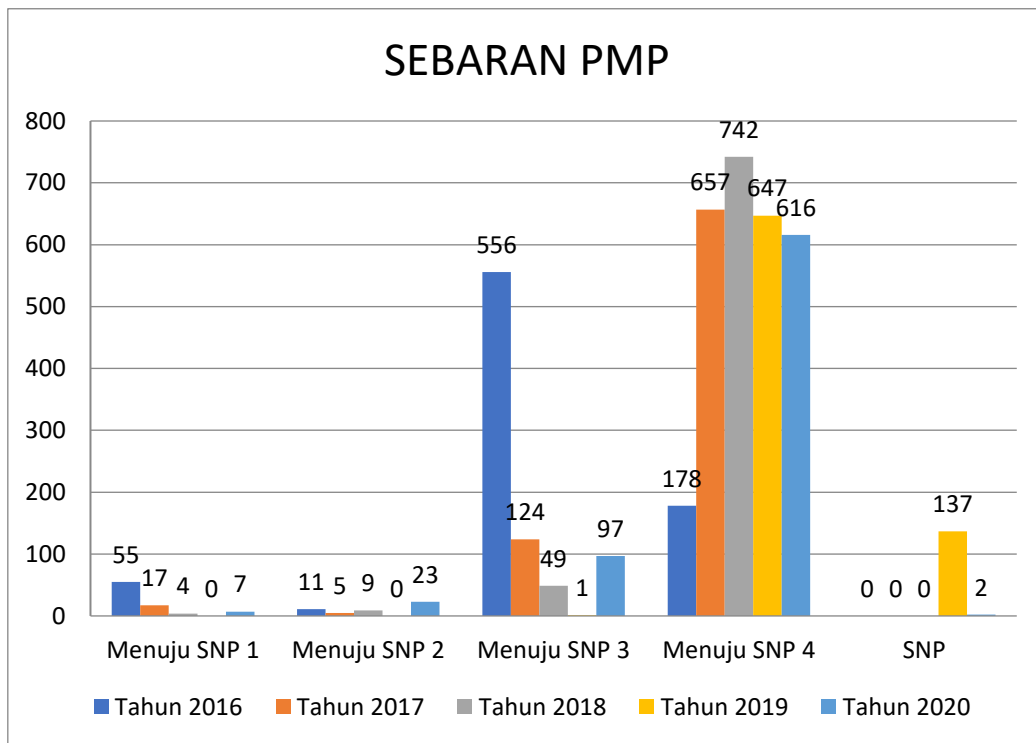
Tabel 1 : Sebaran PMP SD 5 Tahun Terakhir

TAHUN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PROGRES	JUMLAH SEKOLAH TERPETAKAN					PROSENTASE				
Jumlah Sekolah	800	803	804	785	745	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
M1	55	17	4	0	7	6,88	2,12	0,50	0,00	0,94
M2	11	5	9	0	23	1,38	0,62	1,12	0,00	3,09
M3	556	124	49	1	97	69,50	15,44	6,09	0,13	13,02
M4	178	657	742	647	616	22,25	81,82	92,29	82,42	82,68
SNP	0	0	0	137	2	0,00	0,00	0,00	17,45	0,27

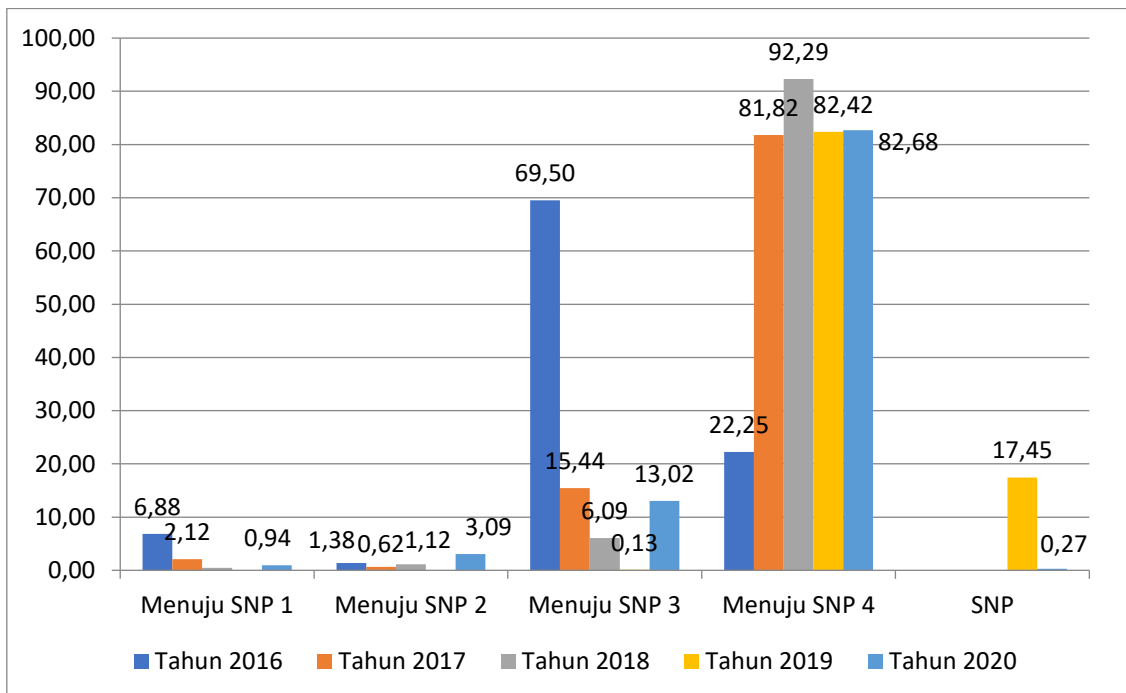
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar yang terpetakan pada tahun 2016 sebanyak 800 sekolah, pada tahun 2017 meningkat menjadi 803 sekolah, pada tahun 2018 meningkat menjadi 804 sekolah pada tahun 2019 menurun menjadi 785 sekolah, pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 745 sekolah. Penurunan sekolah yang terpetakan ini karena sekolah mengalami kegagalan dalam proses pengiriman data PMP ataupun gagal dalam pengolahan rapor diserver PMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sebaran hasil Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat kita sajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 : Sebaran Capaian SNP terhadap Jumlah SD



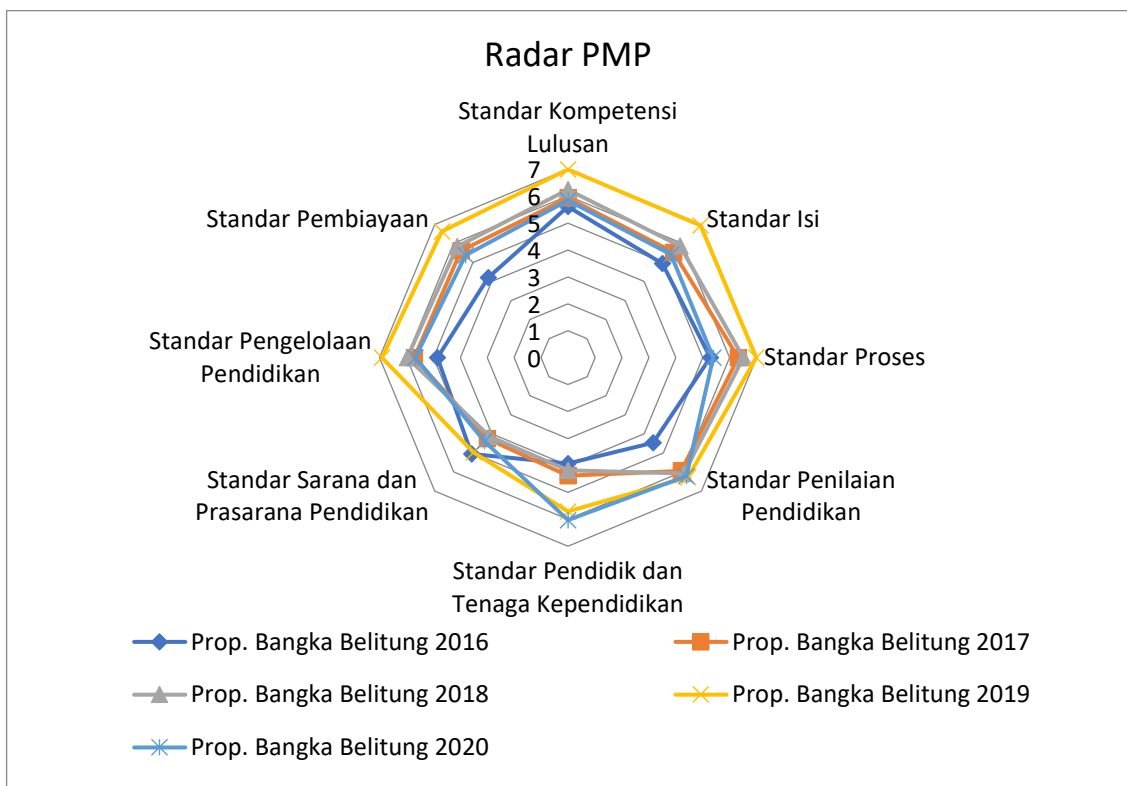
Grafik 2 : Prosentase Sebaran Capaian SNP Jenjang SD



Grafik 2 menunjukkan bahwa pencapaian sekolah ada kenaikan kategori standar. Tahun 2016 capaian standar pada kategori M3 sebanyak 69,50%, selanjutnya pada tahun 2017 pada kategori M4 sebanyak 81,82% selanjutnya pada tahun 2018 pada kategori M4 juga dan meningkat menjadi 92,29% dan pada tahun 2019 sudah ada di kategori SNP 17,45%, pada tahun 2020 terjadi peningkatan di M4 tetapi mengalami penurunan di kategori SNP.

Capaian nilai rata-rata per standar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3 : Radar PMP SD



Lebih jelasnya capaian nilai rata-rata per standar pada standar nasional pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Capaian Nilai Rata-Rata per Standar pada SD 5 Tahun Terakhir

No	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017	018	2019	2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.61	5.93	6.24	6.99	5.84
2	Standar Isi	4.95	5.54	5.87	6.95	5.41
3	Standar Proses	5.28	6.32	6.51	6.99	5.39
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.46	5.95	6.08	6.29	6.22
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.93	4.38	4.18	5.71	6.03
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.06	4.25	4.13	4.97	4.39
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.85	5.71	5.97	6.91	5.67
8	Standar Pembiayaan	4.2	5.62	5.83	6.63	5.39
	Rata-rata	4,79	5,46	5,60	6.43	5.54
	Kategori	M3	M4	M4	M4	M4

Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan bahwa nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai M4

Standar Isi menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, pada tahun 2019 rentang nilainya pada katagori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai M4.

Standar Proses menunjukkan bahwa nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori SNP.

Standar Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada empat tahun terakhir berada pada kategori M4, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan Standar Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, 2017 dan 2018 capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada dua tahun terakhir berada pada kategori M4, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kenaikan dimungkinkan karena terjadi pengurangan indikator pada tenaga kependidikan yang dinilai dan belum dimiliki oleh sekolah.

Standar sarana dan prasarana selama lima tahun terakhir masih berada pada kategori M3, bahkan untuk rata-rata nilai standarnya mengalami penurunan hingga tahun 2018, hal ini dimungkinkan karena ada penambahan indikator yang dinilai dan sekolah belum memiliki sarana dan prasarana ataupun memiliki tetapi dengan kondisi rusak, pada tahun 2019 rentang nilainya masih berada di katagori M3 walaupun terjadi kenaikan, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali.

Standar Pengelolaan pendidikan Standar menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, pada tahun 2019 rentang nilainya pada katagori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4.

Standar Pembiayaan pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya empat tahun terakhir mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4.

#### **b. Capaian Standar Nasional Pendidikan SMP**

Capaian SNP hasil pemetaan mutu pendidikan Jenjang SMP berdasar Rapor PMP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

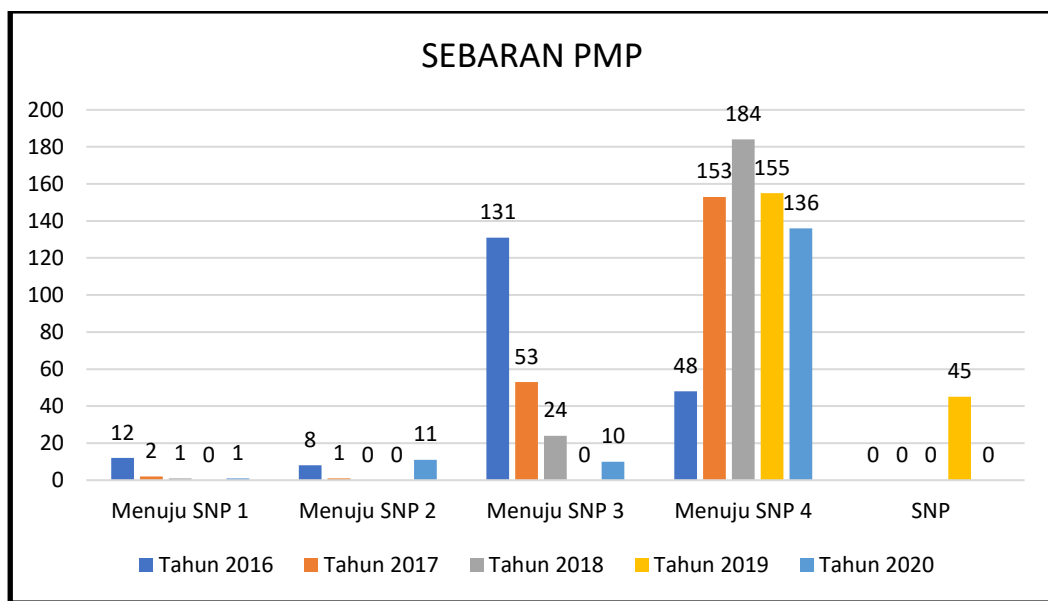
Tabel 3 : Sebaran PMP SMP 5 Tahun Terakhir

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PROGRES	JUMLAH SEKOLAH TERPETAKAN					PROSENTASE				
Jumlah Sekolah	199	209	209	200	158	100	100	100	100,00	100,00
M1	12	2	1	0	1	6.03	0.96	0.48	0,00	0,63
M2	8	1	0	0	11	4.02	0.48	0.00	0,00	6,96
M3	131	53	24	0	10	65.83	25.36	11.48	0,00	6,33
M4	48	153	184	155	136	24.12	73.21	88.04	77,50	86,08
SNP	0	0	0	45	0	0.00	0.00	0.00	22,50	0,00

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah SMP yang terpetakan pada tahun 2016 sebanyak 199 sekolah, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 209 sekolah, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 200 sekolah. Penurunan sekolah yang terpetakan ini mengalami kegagalan dalam proses pengiriman data PMP dan perhitungan rapor mutu di server PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Capaian SNP hasil Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat kita sajikan dalam grafik sebaran PMP SMP berikut:

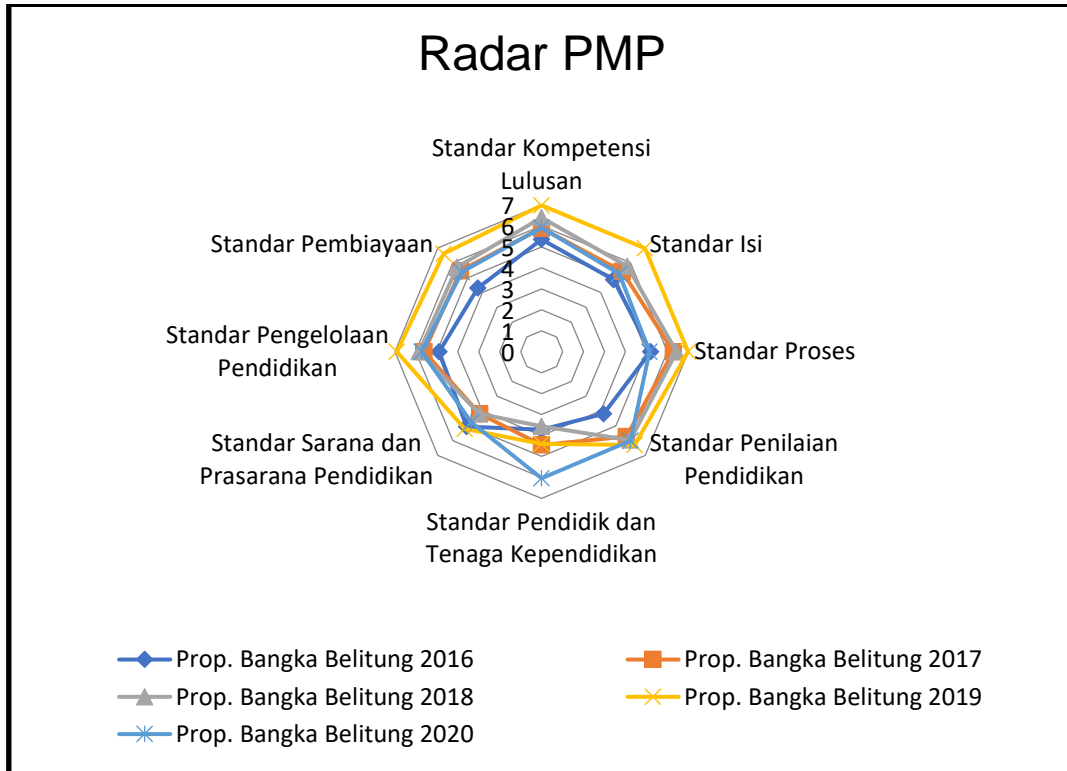
Grafik 4 : Sebaran Capaian SNP terhadap Jumlah SMP



menunjukkan bahwa ada trend positif pencapaian sekolah pada kenaikan kategori standar. Tahun 2016 capaian standar pada kategori M3 sebanyak 65,83%, selanjutnya pada tahun 2017 pada kategori M4 sebanyak 73,21% dan pada tahun 2018 juga pada kategori M4 dan meningkat menjadi 88,04%, pada tahun 2019 77,50% pada kategori M4 dan 22,50% berada di kategori SNP, sedangkan pada tahun 2020 86,08% pada kategori M4 dan belum ada yang berada di kategori SNP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan capaian SNP sekolah

Capaian nilai rata-rata per standar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 6 : Radar PMP SMP



Lebih jelasnya capaian nilai rata-rata per standar pada standar nasional pendidikan pada jenjang SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian 4 : Nilai Rata-Rata per Standar pada SMP 5 Tahun Terakhir

No	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.36	5.9	6.4	6,99	5,92
2	Standar Isi	4.86	5.43	5.78	6,97	5,25
3	Standar Proses	5.2	6.29	6.44	6,99	5,15
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.19	5.72	5.97	6,29	6,01
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.72	4.45	3.55	4,4	6,04
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.06	4.18	4.19	5,2	4,75
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.89	5.61	5.84	6,91	5,72
8	Standar Pembiayaan	4.3	5.47	5.71	6,62	5,38
	Rata-rata	4,70	5,38	5,49	6,30	5,53
	Kategori	M3	M4	M4	M4	M4

Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan bahwa nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori SNP, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian menjadi M4

Standar Isi menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori SNP, pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian menjadi M4.

Standar Proses menunjukkan bahwa nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori SNP, pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian menjadi M4.

Standar Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori M4, walaupun terjadi penurunan ditahun 2020.

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan selama tiga tahun terakhir masih berada pada kategori M3, dan nilai rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2017, namun turun kembali pada tahun 2018. Penurunan dimungkinkan karena terjadi penambahan indikator pada tenaga kependidikan yang dinilai dan belum dimiliki oleh sekolah. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan berada di kategori M3 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi kategori M4.

Standar sarana dan prasarana sampai tahun 2018 masih berada pada kategori M3, bahkan untuk rata-rata nilai standarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini dimungkinkan karena ada penambahan indikator yang dinilai dan sekolah belum memiliki sarana dan prasarana ataupun memiliki tetapi dengan kondisi rusak. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan berada di kategori M4 dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi kategori M3.

Standar Pengelolaan pendidikan Standar menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, Pada tahun 2019 terjadi kenaikan berada di kategori SNP dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi kategori M4.

Standar Pembiayaan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian tandar masih pada kategori M3. Selanjutnya nilai rata-rata standar menunjukkan kenaikan dan rentang nilainya sudah mencapai pada kategori M4, walaupun terjadi penurunan ditahun 2020.

### c. Capaian Standar Nasional Pendidikan SMA

Capaian SNP hasil pemetaan mutu pendidikan Jenjang SMA berdasar Rapor PMP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 : Sebaran PMP SMA 5 Tahun Terakhir

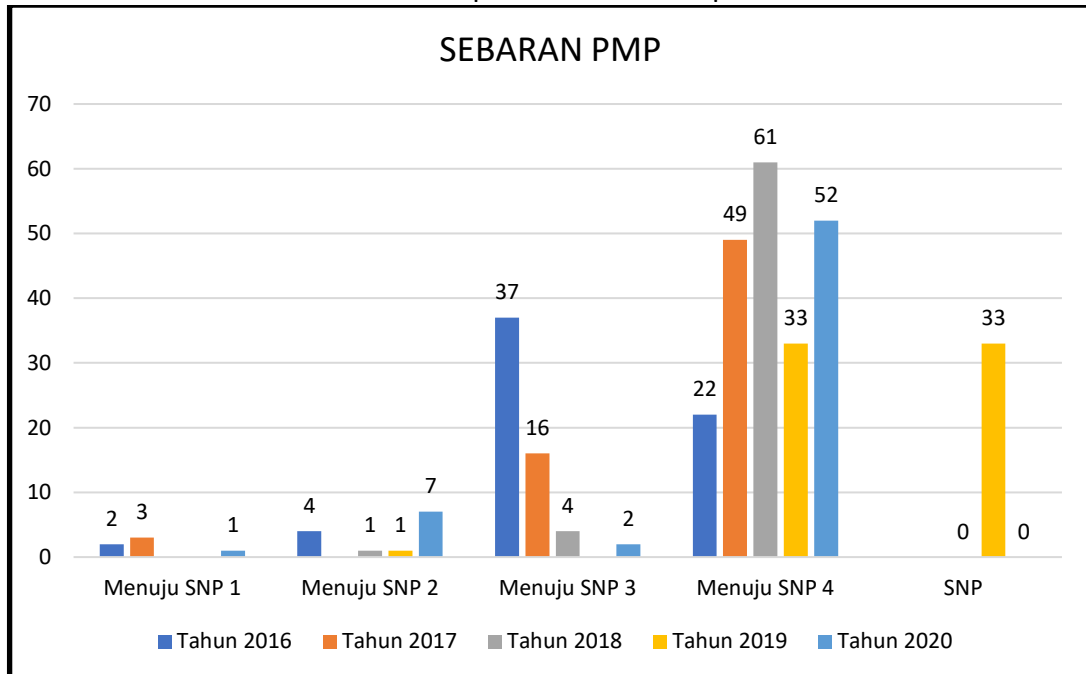
TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PROGRES	JUMLAH SEKOLAH TERPETAKAN					PROSENTASE				
Jumlah Sekolah	65	68	66	67	62	100	100	100	100,00	100,00
M1	2	3	0	0	1	3.08	4.41	0.00	0,00	1,61
M2	4	0	1	1	7	6.15	0.00	1.52	1,49	11,29
M3	37	16	4	0	2	56.92	23.53	6.06	0,00	3,23
M4	22	49	61	33	52	33.85	72.06	92.42	49,25	83,87
SNP	0	0	0	33	0	0.00	0.00	0.00	49,25	0,00

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah SMA yang terpetakan pada tahun 2016 sebanyak 65 sekolah, pada tahun 2017 meningkat menjadi 68sekolah, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 66 sekolah, pada tahun 2019 naik kembali menjadi 67 sekolah, pada tahun 2020 turun kembali menjadi 62. Penurunan sekolah yang terpetakan ini karena mengalami kegagalan dalam proses pengiriman data PMP dan penghitungan rapor mutu di server PMP Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apabila dilihat dari prosentase kategori pencapaian SNP, pada tahun 2016 terbanyak terdapat pada kategori M3 sebanyak 56,92%, sedangkan pada tahun 2017 pada kategori M4 sebanyak 72,06%, pada tahun 2018 pada kategori M4 sebanyak 92.42%, pada tahun 2019 pada kategori SNP sebanyak 49,25%, pada tahun 2020 pada kategori M4 sebanyak 83,87%.

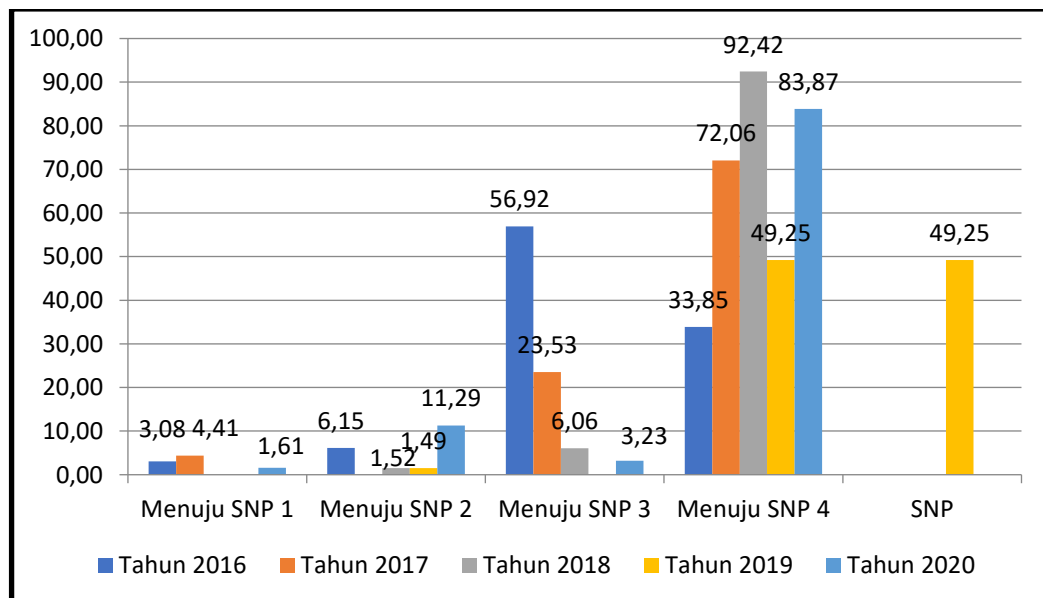
Sebaran hasil Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat kita sajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 : Sebaran Capaian SNP terhadap Jumlah SMA



Adapun prosentase sebaran pemetaan mutu pendidikan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

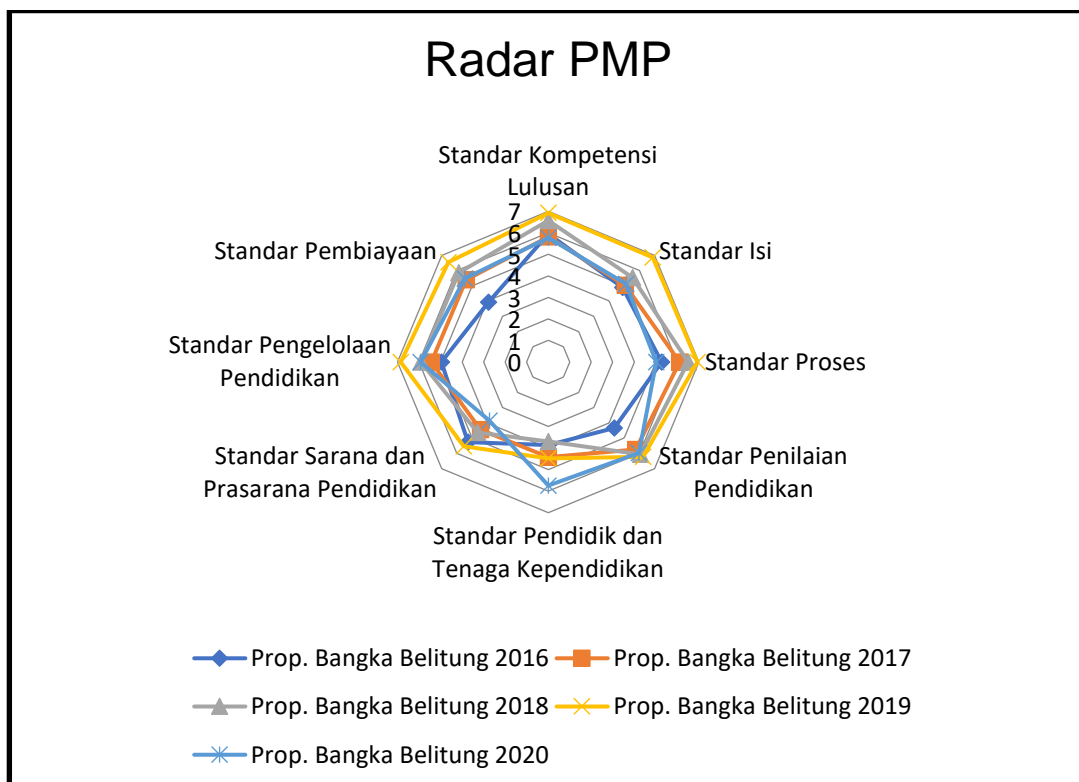
Grafik 8 : Prosentase Sebaran PMP SMA



menunjukkan bahwa ada trend positif pencapaian sekolah pada kenaikan kategori standar. Tahun 2016 capaian standar terbanyak pada kategori M3 sebanyak 56,92%, selanjutnya pada tahun 2017 pada kategori M4 sebanyak 72,06%, dan pada tahun 2018 pada kategori M4 juga dan meningkat menjadi 92,42%. Pada tahun 2019 pada kategori M4 menjadi 49,25% dan sudah ada di kategori SNP 49,25% , Pada tahun 2020 pada kategori M4 menjadi 83,87% dan tidak ada di kategori SNP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun dilakukan pemetaan mutu pendidikan mutu sekolah secara umum juga semakin meningkat terutama di kategori M4.

Capaian nilai rata-rata per standar jenjang SMA dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 9 : Radar PMP SMA



Lebih jelasnya capaian nilai rata-rata per standar pada standar nasional pendidikan pada jenjang SMA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 : Capaian Nilai Rata-Rata per Standar pada SMA lima Tahun Terakhir

No	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.95	5.81	6.57	6,92	5,77
2	Standar Isi	4.89	5.05	5.54	6,86	5,13
3	Standar Proses	5.27	6.11	6.5	6,93	5,02
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.34	5.75	6.07	6,23	5,97
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.86	4.42	3.69	4,48	5,74
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.26	4.45	4.64	5,54	3,85
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.96	5.43	5.91	6,85	5,93
8	Standar Pembiayaan	3.93	5.4	5.87	6,56	5,48
	Rata-rata	4.81	5.30	5.60	6,92	5,77
	Kategori	M3	M4	M4	M4	M4

Standar Kompetensi Lulusan menunjukkan peningkatan terus hingga pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 sudah berada pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4

Standar Isi menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata dan mencapai pada kategori M4, dan pada tahun 2019 sudah berada pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4.

Standar Proses menunjukkan peningkatan terus hingga pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 sudah berada pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4.

Standar Penilaian Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, dan pada tahun 2019 sudah berada pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4.

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan masih berada pada kategori M3, dan nilai rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2017, namun turun kembali pada tahun 2018. Penurunan dimungkinkan karena terjadi penambahan indikator pada tenaga

kependidikan yang dinilai dan belum dimiliki oleh sekolah. Tetapi pada tahun 2019 naik kembali dan berada pada kategori M4, pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali walaupun masih di kategori M4

Standar sarana dan prasarana selama pada tahun 2016 berada pada kategori M4, akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 menurun pada kategori M3, hal ini dimungkinkan karena ada penambahan indikator yang dinilai dan sekolah belum memiliki sarana dan prasarana ataupun memiliki tetapi dengan kondisi rusak, tetapi pada tahun 2019 naik kembali dan berada pada kategori M4, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M3

Standar Pengelolaan pendidikan Standar menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, dan pada tahun 2019 sudah berada pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4.

Standar Pembiayaan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016, capaian standar masih pada kategori M3. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata yang rentang nilainya pada kategori M4, dan pada tahun 2019 naik kembali dan berada pada kategori SNP, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi kategori M4

## **2. Kondisi Sekolah, Pendidik dan Peserta didik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berikut ini data Sekolah, Pendidik dan Peserta didik yang telah dihimpun di BPMP Kepulauan Bangka Belitung hingga Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 7 : Rekapitulasi Jumlah Sekolah Prov. Kepulauan Bangka Belitung - Tahun 2021

No	Wilayah	Total			PAUD			DIKMAS			SD			SMP			SMA			SLB		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kab Bangka	441	218	223	161	8	153	31	1	30	183	166	17	46	32	14	18	10	8	2	1	1
2	Kab Bangka Barat	356	179	177	155	16	139	18	1	17	137	128	9	36	27	9	9	6	3	1	1	0
3	Kab Bangka Tengah	310	127	183	125	7	118	48	1	47	99	90	9	29	21	8	8	7	1	1	1	0
4	Kab Belitung	256	157	99	84	16	68	15	1	14	120	114	6	29	21	8	7	4	3	1	1	0
5	Kota Pangkalpinang	247	89	158	78	7	71	39	1	38	91	66	25	27	10	17	10	4	6	2	1	1
6	Kab Bangka Selatan	245	148	97	85	14	71	14	1	13	96	93	3	37	30	7	12	9	3	1	1	0
7	Kab Belitung Timur	229	148	81	86	17	69	9	0	9	104	103	1	23	22	1	6	5	1	1	1	0
Total		2084	1066	1018	774	85	689	174	6	168	830	760	70	227	163	64	70	45	25	9	7	2

Tabel 8 : Rekapitulasi Jumlah Guru Prov. Kepulauan Bangka Belitung – Tahun 2021

No	Wilayah	Total			PAUD			SD			SMP			SMA			Pendidikan Masyarakat		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kab. Bangka	3422	899	2523	534	7	527	1.741	506	1.235	711	220	491	393	150	243	43	16	27
2	Kota Pangkalpinang	2390	599	1791	428	13	415	1.166	286	880	474	165	309	267	112	155	55	23	32
3	Kab. Bangka Barat	2583	683	1900	530	6	524	1.345	422	923	479	169	310	212	76	136	17	10	7
4	Kab. Bangka Tengah	2313	654	1659	461	14	447	1.148	377	771	444	150	294	203	84	119	57	29	28
5	Kab. Bangka Selatan	2276	819	1457	259	4	255	1.174	462	712	517	222	295	268	109	159	58	22	36
6	Kab. Belitung	2029	589	1440	289	4	285	1.091	331	760	451	168	283	175	81	94	23	5	18
7	Kab. Belitung Timur	1714	467	1247	307	2	305	881	243	638	333	134	199	176	81	95	17	7	10
	<b>Total</b>	<b>16727</b>	<b>4710</b>	<b>12017</b>	<b>2808</b>	<b>50</b>	<b>2758</b>	<b>8.546</b>	<b>2.627</b>	<b>5.919</b>	<b>3.409</b>	<b>1.228</b>	<b>2.181</b>	<b>1.694</b>	<b>693</b>	<b>1.001</b>	<b>270</b>	<b>112</b>	<b>158</b>

Tabel 9 : Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik Prov. Kepulauan Bangka Belitung – 2021

No	Wilayah	Total			PAUD			SD			SMP			SMA			Pendidikan Masyarakat		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kab. Bangka	64099	32999	31100	6996	3556	3440	35.879	18.626	17.253	13.502	6.924	6.578	6.457	3.023	3.434	1265	870	395
2	Kota Pangkalpinang	44298	23128	21170	4012	2126	1886	23.954	12.508	11.446	9.944	4.909	5.035	4.463	2.191	2.272	1925	1394	531
3	Kab. Bangka Barat	44128	22538	21590	6277	3158	3119	24.788	12.981	11.807	7.957	3.959	3.998	4.008	1.749	2.259	1098	691	407
4	Kab. Bangka Selatan	43609	22547	21062	4183	2083	2100	24.403	12.818	11.585	8.522	4.242	4.280	4.546	2.134	2.412	1955	1270	685
5	Kab. Bangka Tengah	41933	21780	20153	5950	3078	2872	23.185	12.191	10.994	8.044	4.123	3.921	3.613	1.708	1.905	1141	680	461
6	Kab. Belitung	33827	17403	16424	3358	1722	1636	19.112	9.961	9.151	7.811	3.818	3.993	3.062	1.575	1.487	484	327	157
7	Kab. Belitung Timur	24845	12591	12254	3514	1821	1693	13.135	6.761	6.374	5.012	2.515	2.497	2.734	1.221	1.513	450	273	177
	<b>Total</b>	<b>3E+05</b>	<b>2E+05</b>	<b>1E+05</b>	<b>34290</b>	<b>17544</b>	<b>16746</b>	<b>164.456</b>	<b>85.846</b>	<b>78.610</b>	<b>60.792</b>	<b>30.490</b>	<b>30.302</b>	<b>28.883</b>	<b>13.601</b>	<b>15.282</b>	<b>8318</b>	<b>5505</b>	<b>2813</b>

## B. Potensi dan Permasalahan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Walaupun ada peningkatan capaian-capaian Pendidikan dasar dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan peta mutu pendidikan dari tahun 2016 – 2020. Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2021 capaian output sebagai berikut :

OUTPUT JENJANG SD	OUTPUT JENJANG SMP	OUTPUT JENJANG SMA/SMK	PAUD
Pemerataan Hasil Belajar tidak ada kesenjangan kecuali pemerataan literasi ada perbedaan	Pemerataan Hasil Belajar tidak ada kesenjangan kecuali pemerataan literasi ada perbedaan	Pemerataan Hasil Belajar tidak ada kesenjangan	Kesenjangan Akses PAUD Berdasarkan Kelompok Gender dan Kesenjangan angka partisipasi anak usia 5-6 tahun antar kelompok gender masih rendah

Berdasarkan masalah rendahnya output hasil belajar peserta didik sebagai berikut :

1. Kualitas PTK masih rendah
2. kualitas proses pembelajaran masih rendah
3. Aktivasi kognitif dalam proses pembelajaran berupa menciptakan iklim pembelajaran terbuka dengan memberikan instruksi, panduan dan aktivitas yang interaktif pada pembelajaran literasi dan numerasi yang dipraktekkan oleh guru masih bersifat pasif.
4. Kualitas iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan masih rendah
5. Satuan pendidikan sangat terbatas melibatkan orang tua dan peserta didik dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan
6. Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan yang masih rendah.
7. Dukungan untuk refleksi guru masih terbatas

### C. Tantangan

Dari berbagai potensi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. menunjukkan tantangan-tantangan tersebut tersebut.

Tabel 10 : Tantangan Pemajuan Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepercayaan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepercayaan bekerja sama)
3.	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata ( <i>one size fitsall</i> ) menjadi berpusat pada pelajar dan personalisasi
6.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh peraturan dan perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif ( <i>agency</i> ) semua pemangku kepentingan

## **Permasalahan dan Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

### **a. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal**

Meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besardi era sebelumnya, namun sebagaian yang lain masih perlu upaya penguatan peran dan keterlibatan di dalam meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan. Peran orang tua dalam mendukung kemajuan pendidikan anak masih terbatas padaurusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja. Satuan pendidikanhendaknya menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan agar dapat terlibat aktifdalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan pengelolaan kelas yang baik.

Hasil pemetaan penjaminan mutu melalui evaluasi diri sekolah di Kepulauan Bangka Belitung juga memperlihatkan hal tersebut, dimana capaian standar prosesdan standar kompetensi lulusan untuk seluruh jenjang masih menjadi area yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan mutunya. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

### **b. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun**

Wajib belajar pendidikan 12 tahun bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia usia s.d 21 tahun. Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan, seperti masih ada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah yang belum mendapat pelayanan pendidikan, masih ada anak-anak yang mengalami putus sekolah. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

c. Capaian mutu pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasilakreditasi

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.

Fungsi akreditasi sekolah adalah: (a) untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, (b) untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (c) untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Berdasarkan Hasil akreditasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar

Tabel 10 : Hasil Akreditasi Sekolah Dasar

Kabupaten/kota SD	JUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI				TOTAL
	A	B	C	TT	
Pangkalpinang	36	47	4	2	89
Bangka	78	73	9		160
Bateng	34	50	8	1	93
Basel	39	41	7	1	88
Babar	25	109	15	1	150
Belitung	12	104	4		120
Beltim	16	85	2		103
JUMLAH	240	509	49	5	803

Sumber data : BAN/M Prov. Kep. Babel

2. Sekolah Menengah Pertama

Tabel 12 : Hasil AKreditasi SMP

Kabupaten/kota SMP	JUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI				TOTAL
	A	B	C	TT	
Pangkalpinang	17	6	1		24
Bangka	30	12	2		44
Bateng	7	12	3	3	25
Basel	13	17	1	1	32
Babar	19	9	4	2	34
Belitung	15	13			28
Beltim	13	11			24
JUMLAH	114	80	11	6	211

Sumber Data : BAN/M Prov. Kep. Babel

3. Sekolah Menengah Atas

Tabel 13 : Hasil Akreditasi SMA

Kabupaten/kota SMA	JUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI					TOTAL
	A	B	C	TT	BT	
Pangkalpinang	4	5			1	10
Bangka	11	6				17
Bateng	5	2		1	1	9
Basel	8	2		2		12
Babar	7	3				10
Belitung	4	3				7
Beltim	5	2				7
JUMLAH	44	23		3		70

Sumber data : BAN/M Prov. Kep Bab

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah selaku unit kerja atasannya, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan dua tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024, yaitu :

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Renstra
1.	Peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan (PAUD Dikmas) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,92%
		Meningkatnya rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Provinsi/Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35%
2.	Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akuntabel	Meningkatnya predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	A
		Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85

## B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dirumuskanlah sasaran kegiatan sebagai pentahapan capaian tiap tahunnya. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan untuk mengukur tingkat pencapaiannya.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	SK 1 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
		IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
2	SK 2 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung
		IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi**

##### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan Kementerian dan Lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Rencana Strategis Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020- 2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemdikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4 dan 7.

##### **2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Penunjang Strategi Nasional**

Arah kebijakan, strategi, dan program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang mendukung Strategi Nasional pada agenda pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Agenda Pembangunan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing  
Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat

dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

b. Agenda Pembangunan : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

c. Agenda Pembangunan : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik.

3. Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penunjang Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan.

Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Semua anak Usia Sekolah dan Prasekolah mendapatkan Layanan Pendidikan

1. Meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian BOP PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, Kebijakan SPM, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong

- tersedianya satu desa satu PAUD;
2. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD kepada anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi;
  3. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMP melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
  4. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
  5. Program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA dan SMK untuk daerah 3T melalui pembangunan SMA/SMK satu atap atau layanan sekolah berasrama untuk melayani daerah yang tidak mungkin dibangun sekolah;
  6. Menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
  7. Perluasan layanan pendidikan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan reguler dan inklusi.
  8. Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah; dan
  9. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan di daerah afirmasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global;
2. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas.

Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa

Indonesia dan berkewargaan global

- Mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif;
- Melaksanakan program sekolah penggerak sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
- Menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa;
- Mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;
- Menerapkan pembelajaran paradigma baru pada semua satuan pendidikan melalui pengimbasan sekolah penggerak ataupun penerapan secara mandiri;
- Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
- Memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan;
- Mengembangkan program penguatan iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebinekaan satuan pendidikan;
- Memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membangun karier sesuai dengan bidangnya; dan
- Melakukan pembinaan minat dan bakat bagi siswa berprestasi.

## 2. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas

- Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM], survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;
- Mengembangkan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan dengan menggunakan asesmen nasional dan data pendidikan;
- Menguatkan pemanfaatan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis; dan

- Menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis data dan meta analisis dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Indonesia.

c. Tata Kelola Pendidikan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akuntabel dan berkualitas

Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan;
- Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;
- Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- Memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik;
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berbasis mekanisme manajemen talenta

2. Pelayanan Publik yang Prima

Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;

- Memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;
- Mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan Pendidikan.

## B. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.</li> </ol>	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan Pendidikan</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka).</li> <li>4. Standar Pendidikan.</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, Pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan oleh negara asing.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

### C. Kerangka Kelembagaan

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara optimal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kementerian

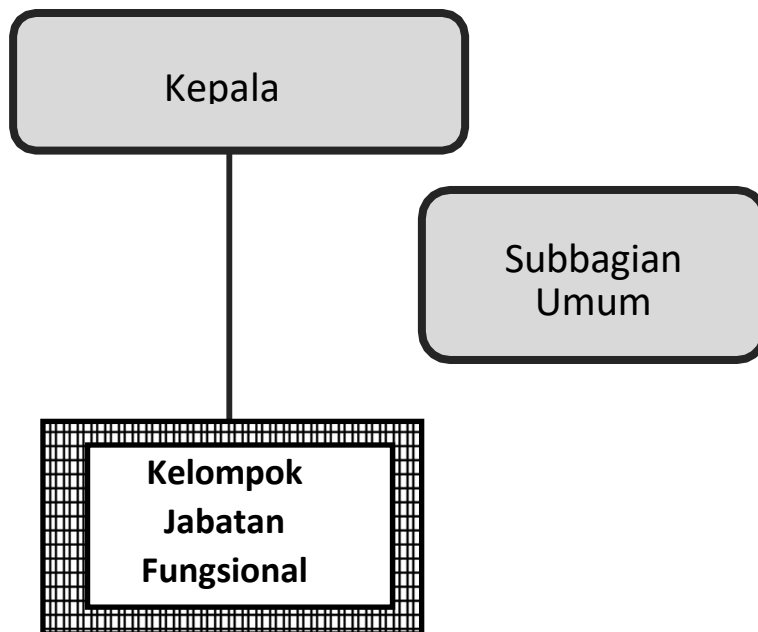
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
- b. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
- c. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu Pendidikan
- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu Pendidikan
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi

## Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi BPMP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, maka Struktur BPMP adalah seperti pada gambar berikut ini:



Seperti yang terlihat pada gambar di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP, Kepala BPMP dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

## **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan system merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality, networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Adapun Sumber Daya ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai berikut :

Tabel 14 : Daftar ASN di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	KUALIFIKASI	STRUKTURAL		PELAKSANA		FUNGSIONAL		TOTAL		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SMA	-	-	1	-	-	-	1	-	1
2	D3	-	-	-	1	-	-	-	1	1
2	S1	-	-	8	7	-	-	8	7	15
3	S2	2	-	5	20	7	7	12	27	39
	TOTAL	2	-	14	28	7	7	23	33	56

## Tata Nilai BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Values Berakhlak* Dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara yaitu **Bangga Melayani Bangsa. Kode etik berdasarkan nilai utama** pada Renstra BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

### 1. Berorientasi Pelayanan

Yaitu berkomitmen untuk memberikan pelayanan demi kepuasan masyarakat.

Adapun indikator yang mencerminkan nilai berorientasi pelayanan adalah:

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- c. Melakukan perbaikan tiada henti

### 2. Akuntabel

Yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan

Indikator dari nilai akuntabel adalah:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

### 3. Kompeten

Yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Indikator dari nilai Kompeten adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;

c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

**4. Harmonis**

Yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Indikator yang menunjukkan nilai harmonis adalah :

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- b. Suka menolong orang lain;
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

**5. Loyal**

Yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Indikator yang mencerminkan nilai loyal adalah:

- a. Memegang teguh ideologi pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, setia pada negara kesatuan republik indonesia serta pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga nama baik sesama asn, pimpinan, instansi, dan negara;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara

**6. Adaptif**

Yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

Nilai adaptif terlihat dari indicator :

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c. Bertindak proaktif.

## 7. Kolaboratif

Yaitu membangun kerja sama yang sinergis

Indikator nilai kolaboratif adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

## Reformasi Birokrasi

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)</li><li>b. Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li><li>c. Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja</li><li>d. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li><li>e. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0</li></ol>

2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> <li>b. Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP</li> <li>c. Penguatan Sistem Manajemen Konflik</li> </ul>
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (collaborative)</li> <li>b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil</li> </ul>
4.	Penguatan Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asessment organisasi berbasis kinerja</li> <li>b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi</li> </ul>
5.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan</li> <li>b. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)</li> </ul>
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Profesionalitas ASN</li> <li>2. Indeks Merit System</li> <li>3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</li> <li>b. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi</li> <li>c. Assessment Pegawai</li> <li>d. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik</li> <li>e. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai</li> <li>f. Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)</li> </ul>
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Hukum</li> <li>2. Indeks Kualitas Kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan)</li> <li>b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi</li> <li>c. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan</li> </ul>

			d. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik	a. Penyusunan dokumen standar pelayanan b. Penyusunan alur layanan public c. Mengembangkan budaya pelayanan prima d. Penguatan kompetensi petugas pelayanan public e. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan satuan kerja dalam mewujudkan tercapainya sasaran kegiatan/indikator kinerja kegiatan. BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program/indikator kinerja program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Baseline	Target		
		2020	2022	2023	2024
SK 1 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	-	0,98%	1,96%	3,92%
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	25%	30%	35%
SK 2 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	BB	BB	BB	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	81	83	84	85

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut dilakukan melalui Program Prioritas sebagai berikut :

1. Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
  - a. Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP
    - Pendampingan Program Sekolah Penggerak
    - Perencanaan Berbasis Data
    - Advokasi Penerapan Kurikulum Merdeka
    - Pendampingan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar
    - Pengembangan Kemitraan dan Implementasi Kebijakan Lintas Sektor
  - b. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan
    - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program Transfer Daerah
  
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Melakukan upaya dalam birokrasi dengan menyederhanakan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola menjadi fleksibel dan efisien.
  - b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Melakukan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

## **B. Kerangka Pendanaan**

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. Pagu 2021 dan Pagu 2022; dan
2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2023-2024

Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2021 – 2022

Label	Kode	Program/Output	Pagu 2021 (Ribu Rp)	Pagu 2022 (Ribu Rp)
Program	023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.044.088	17.282.218
Kegiatan	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	2.808.966	4.666.711
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	13.235.122	12.615.507

Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2024

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Ribu Rp)		Jumlah
		2023	2024	
		1.	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	15.928.200	15.928.200	31.856.400
<b>Jumlah</b>		<b>28.352.532</b>	<b>28.352.532</b>	<b>56.705.064</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Renstra secara baik dan benar karena Renstra merupakan acuan dan penunjuk arah bagi unit kerja dan ekosistem didalamnya selama lima tahun ke depan.

Renstra LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Renstra Kementerian dan unit kerja eselon I atasannya. Renstra yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta strategi pencapaian akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara periodik untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang jumpai dalam upaya pencapaian target. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan juga untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai yang direncanakan. Capaian-capaian kinerja yang dihasilkan tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Semoga Renstra LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024, dapat memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

# LAMPIRAN

Lampiran 1a : Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu Rp)
			2020	2020
SK1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				2.851.335
IKK 1.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%	26,5	
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95	
SK2 Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik				14.476.019
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Predikat	BB	
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	81	

Lampiran 1b : Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi (Ribu Rp)
			2021	2021
SK1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan				2.808.966
IKK 1.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%	27,4	
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,2	
SK2 Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik				13.235.122
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Predikat	BB	
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	82	

Lampiran 1c : Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (Ribu Rp)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						4.666.711	12.424.332	12.424.332
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,96	3,92			
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25	30	35			
SK 2	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung						12.615.507	15.928.200	15.928.200
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Predikat	BB	BB	BB	A			
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai	81	83	84	85			

Lampiran 2 : Definisi Operasional Indikator Kinerja

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	Unit Pelaksana	Sumber Data
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasilrapor pendidikan atau survey lingkungan belajar	$(\Sigma \text{ satuan PAUD dan Dikmasyang rapor Pendidikan atausurvey lingkungan belajar meningkat} / \Sigma \text{ satuan PAUD dan Dikmas pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mendekati 100%	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya	$(\Sigma \text{ satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor Pendidikannya meningkat} / \Sigma \text{ satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) per tahun mendekati 100%	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	Unit Pelaksana	Sumber Data
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$	Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP	BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan hasil evaluasi SAKIP
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk	$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$	Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran	BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Aplikasi SPASIKITA Terintegrasi dengan Smart DJA

		menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat, penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu : Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran ( IKPA) dan indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA				
--	--	---	--	--	--	--